

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dari proses perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari sisi aspek keuangan daerah, APBD merupakan dokumen inti yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini didasarkan oleh pasal 309 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka semua aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib berpedoman kepada dokumen APBD yang telah disusun dan ditetapkan.

Dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, maka perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan pembangunan yang menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 258 mengamanatkan bahwa daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah tersebut, maka daerah menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan perencanaan untuk jangka panjang (20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perencanaan untuk jangka menengah (5 tahun); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan untuk perencanaan jangka pendek (1 tahun). Selanjutnya dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan RKPD, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta PPAS untuk mengimplementasikan perencanaan kedalam proses penganggaran.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Bintan telah disusun dan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021. RKPD tersebut memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), dimana kebijakan umum anggaran tersebut merupakan implementasi dari RKPD yang bersumber dari dana APBD sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sesuai dengan ketentuan pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada

DPRD untuk dibahas bersama. Selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka seluruh rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD dan telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah terlebih dahulu dibuat kesepakatan lagi antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara, PPAS disusun dengan tahapan :

- 1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
- 3) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Skala Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 dengan tetap mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yang sudah ada. Oleh karena itu prioritas pembangunannya disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan dengan memperhatikan tema Pemerintah untuk tahun 2021 yaitu **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”** dipilih dengan pertimbangan mitigasi Covid-19. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan berikut ini :

1. Pertama, pemulihan industri, pariwisata, dan investasi.
2. Kedua, reformasi sistem kesehatan nasional.
3. Ketiga, reformasi sistem jaring pengaman sosial.
4. Keempat, reformasi sistem ketahanan bencana.

RKP 2021 juga memuat tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, antara lain penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bintan Tahun 2021. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing OPD.

PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing OPD berdasarkan program dan kegiatan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah Peraturan Daerah tentang APBD disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dalam upaya memenuhi kaidah regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dalam proses penyusunan PPAS telah dilakukan sinkronisasi program kegiatan dan unit organisasi pelaksana beserta alokasi plafon anggaran yang bersifat sementara, baik untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaan tugas rutin operasional OPD dapat berjalan dengan lancar dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Penentuan prioritas penting oleh karena untuk tetap fokus kepada capaian program pembangunan, pengawasan penggunaan sumber daya agar efisien, efektif dan optimal serta membangun komunikasi mengenai program/kegiatan antar stakeholder yang menghubungkan antara kebijakan dan tujuan ekonomi sosial pemerintah.

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Menyediakan dokumen tentang target dari pendapatan dan penerimaan daerah, belanja daerah serta target pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021.
2. Menyediakan dokumen tentang plafon anggaran sementara berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), urusan pemerintahan dan program kegiatan Tahun Anggaran 2021;
3. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
4. Mewujudkan keterpaduan program nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten Bintan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
5. Terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan (RKPD), penganggaran (KUA, PPAS, APBD), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan (Monitoring dan Evaluasi Pembangunan) antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten;
6. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3 Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Binta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
32. Peraturan Kepala Daerah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Binta Tahun 2021.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1 Rencana Target Pendapatan Asli Daerah

Rencana Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp.279.362.380.619,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.303.035.228.417,- maka mengalami penurunan sebesar 7,81 persen. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2021 yang diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 adalah bersumber dari Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sementara yang lain seperti Retribusi Daerah tetap atau sama dengan proyeksi pada Tahun Anggaran 2020 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan yaitu pendapatan BLUD. Rincian untuk masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut :

- Estimasi Penerimaan Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp.226.204.413.000,- jika dibandingkan dengan penerimaan pada APBD Murni tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.30.763.595.898,- atau 10,05 persen.
- Estimasi Penerimaan Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp.10.988.510.000,- jika dibandingkan dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.62.290.000,- atau 0,56 persen.
- Estimasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp.10.477.231.219,- tidak mengalami perubahan atau sama dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2020.

- Sedangkan Estimasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp.31.692.226.400,- jika dibandingkan dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.653.038.100,- atau 5,5 persen.

2.2 Rencana Target Pendapatan Transfer

Penerimaan dari Pendapatan transfer terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana desa dan pendapatan transfer antar daerah. Penerimaan ini merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat penerimaannya saling mengisi dan melengkapi.

Pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp.852.784.716.920,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.995.555.553.428,- maka mengalami penurunan sebesar Rp.142.770.836.508,- atau 14,34 persen.

Seluruh Objek Pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 tahun 2020 Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Rincian untuk masing-masing sumber Dana Perimbangan, sebagai berikut:

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: dana perimbangan;

dana insentif daerah; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana desa. Rencana penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, pada APBD Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.789.713.952.000,- jika dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Murni tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.147.446.113.312,- atau 15,73 persen.

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Rencana penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah pada APBD Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.63.070.764.920,- jika dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah pada APBD Murni tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.4.675.276.804,- atau 8,01 persen.

2.3 Rencana Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari : hibah, dana darurat, dan/atau, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proyeksi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pendapatan Hibah Dana BOS tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.23.512.200.000,- jika dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Hibah Dana BOS pada APBD Murni tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.912.600.000,- atau 8,85 persen.

2.4 Rencana Target Penerimaan Pembiayaan

Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Proyeksi Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2021

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN (Rp.)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH		
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	279.362.380.619	
04.01.01	Pajak Daerah	226.204.413.000	Perda Kab. Bintan Nomor 1 Tahun 2011 dan Perda Kab. Bintan Nomor 11 Tahun 2011
04.01.02	Retribusi Daerah	10.988.510.000	Perda Kab. Bintan Nomor 1 Tahun 2011 dan Perda Kab. Bintan Nomor 11 Tahun 2011
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.477.231.219	Hasil RUPS Deviden Bank Riau Kepri dan BPR Bintan
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	31.692.226.400	Giro, Deposito, BLUD dan dana Kapitasi JKN Proyeksi Tahun 2020
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	852.784.716.920	
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	789.713.952.000	Alokasi TKDD Tahun 2021
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.070.764.920	Alokasi TKDD Tahun 2021
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.512.200.000	
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.512.200.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.155.659.297.539	
6	PEMBIAYAAN		
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	63.695.069.230	
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	63.695.069.230	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	63.695.069.230	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.219.354.366.769	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Rencana prioritas belanja daerah Kabupaten Bintan yang dituangkan dalam RKPD tahun 2021 disusun berdasarkan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif dan top down-bottom up. Upaya untuk mendukung tema pembangunan dan penyelesaian isu strategis yang dilakukan melalui pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif. Tema pembangunan daerah untuk RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2020 adalah: **“Peningkatan Daya Saing dan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Bintan Gemilang”**. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM yang semakin memiliki daya saing dan berkeadilan dengan fokus pembangunan sebagai berikut:
 - a. pemerataan kualitas pendidikan (sarana dan prasarana), meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersekolah dalam rangka mewujudkan tujuan 4 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, dan perwujudan target SPM sebagaimana Permendikbud Nomor 32 tahun 2018.
 - b. Mewujudkan pelayanan kesehatan baik primer atau Fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan (sarana dan prasarana), meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, promosi kesehatan dalam rangka menekan kematian baik karena melahirkan maupun penyakit, meningkatkan perbaikan gizi pada masyarakat dalam rangka mengurangi dan mengendalikan stunting dan gizi buruk, mewujudkan tujuan berkelanjutan sebagaimana tujuan 2 dan 3 dalam dokumen SDGs, melaksanakan SPM Kesehatan sebagaimana Permenkes Nomor 4 tahun 2019.
 - c. Mengurangi kesenjangan sosial dengan prioritas pada penanganan kemiskinan dan PMKS. Pemberian bantuan langsung pada keluarga melalui PKH dan jaminan perlindungan dan social sebagaimana

- amanat SPM dalam Permensos Nomor 9 tahun 2018 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tujuan 2.
- d. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan prioritas pada penyusunan dokumen perencanaan responsive gender, peningkatan perlindungan perempuan dan anak dalam tindak kekerasan, peningkatan kualitas hidup perempuan rentan. Ini dalam rangka melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tujuan 5.
 - e. Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga dalam pembangunan, peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan budaya melayu dan memajukan budaya melayu, mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan ketrampilan sesuai kebutuhan perusahaan dan pelaksanaan kartu pra kerja.
 - f. Peningkatan partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan dalam peningkatan daya saing daerah. Pengembangan kelembagaan desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten Bintan.
2. Peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan prioritas sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan terutama pada daerah penghubung akses pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pariwisata
 - b. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak. Ini dalam rangka mewujudkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan juga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tujuan 6.
 - c. Peningkatan kualitas perhubungan terutama perhubungan antar pulau, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan perhubungan, meningkatkan peran masyarakat dalam perhubungan
 - d. Peningkatan akses masyarakat pada kepemilikan rumah layak huni sebagaimana amanat dalam SPM bidang perumahan dan permukiman
3. Peningkatan kualitas perekonomian dengan focus pada pemulhan ekonomi pasca COVID 19 dengan prioritas

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan dan distribusi pangan, meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas melalui inovasi pembibitan dan penanaman dengan lahan terbatas, pemanfaatan pekarangan meningkatkan kecukupan konsumsi ikan, kualitas perikanan tangkap dan budidaya, serta pengolah ikan dan system pemasaran.
 - b. Meningkatkan kualitas UMKM, baik produk maupun pemasaran, meningkatkan inovasi produk, memudahkan akses permodalan, serta pendataan usaha mikro
 - c. Meningkatkan kualitas industri kecil dengan pengembangan kualitas sentra sentra industri.
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan pelaksanaan metrology yang baik.
4. Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan prioritas:
- a. peningkatan kualitas dan disiplin kepegawaian, pengawasan, persandian, perpustakaan dan perencanaan
 - b. Peningkatan peran kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) dalam pembangunan berkelanjutan dan pemerataan
 - c. Peningkatan ketentraman, perlindungan masyarakat sebagaimana SPM bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
 - d. Peningkatan kemandirian keuangan dengan peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas pengelolaan asset.
 - e. Mempermudah pelayanan masyarakat dengan berbasis elektronik menuju kabupaten pintar.
 - f. Peningkatan reformasi birokrasi dengan mewujudkan good government, dan implementasi SPBE (Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik).

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Bintan berikut ini kinerja utama daerah:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bintang Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Target 2021 pasca Pandemi COVID
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	≥5	3-5
2	Realisasi Investasi PMA/ PMDN	juta USD	1.771	<1.771
3	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	850.000	<850.000
4	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	≥7,0	< 7
5	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)	%	54,153	<54,153
6	Jumlah Pulau yang berpenghuni yang tercakupi jaringan transportasi	%	11	11
7	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	46	46
8	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,8	2,8
9	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,39	>5,39
10	Peraturan yang mendukung kelestarian nilai dan seni budaya melayu	Jumlah Peraturan	7	7
11	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	≥70	≥70
12	Indeks Pembangunan Gender	%	92,41	92,41
13	Persentase penduduk miskin	%	<6,5	>6,5
14	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	80	80
15	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	100	100
16	Hasil pengukuran indeks kualitas air	poin	70	70
17	Hasil pengukuran indeks kualitas Udara	poin	1	1

Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan

daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Berikut ini tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2021.

Misi 1 Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Target Pasca Pandemi Covid	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Target 2021 pasca Covid						
Terciptanya iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan yang sesuai dengan tata ruang	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,16	≥5	3-5	Meningkatnya realisasi investasi dan pelayanan perijinan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi	Realisasi Investasi PMA/ PMDN	juta USD	1.771	< 1.771						
							Pertumbuhan Ekonomi	%	≥5	3-5						
							Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda penataan Ruang	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang	%	75	75					
Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan Kelautan	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	493.495	850.000	< 850.000	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	850.000	< 850.000						
							Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	7,8	≥7,0	<7	Meningkatnya pengembangan usaha dan industri pariwisata melalui kemitraan dan pembinaan BUMD	Kontribusi BUMD terhadap PAD	Milyar Rupiah	2.89	< 2,89
												Meningkatnya nilai produksi perikanan	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	≥7,0	≤7
						Berkembangnya industri pengolahan dan terjaganya stabilitas harga	Persentase pertumbuhan sektor industri dalam	%	≥6,0	≤6						

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Target Pasca Pandemi Covid	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Target 2021 pasca Covid
						kebutuhan pokok	PDRB			
							Tingkat Inflasi	%	(4±1)%	(4±1)%

Target akhir RPJMD ini berdasarkan kondisi pandemic COVID 19 akan mengalami kendala dalam pencapaiannya. Dampak Pandemi COVID 19 akan berpengaruh pada sector ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan melambat tidak sebagaimana target RPJMD. Pembangunan pariwisata sebagai sumber utama PAD dan PDRB Kabupaten Bintan juga mengalami dampak dari Pandemi COVID 19. Sebagaimana kondisi nasional dan Provinsi Kepulauan Riau target pertumbuhan ekonomi akan melambat di kirasaran 3%-5%.

Misi 2: Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Target 2021 Pasca Covid	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase kawasan pemukiman yang tertata	%	3,3	28	28	Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan prasarana transportasi serta kapasitas dan fungsi sanitasi, air bersih/minum	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)	%	54,153	< 54,153
							Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	100	100
						Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan dikawasan perkotaan dan perdesaan	Persentase kawasan pemukiman yang tertata	%	28	28

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Target 2021 Pasca Covid	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	
Meningkatkan sarana prasarana pengairan untuk mengurangi resiko bencana	Rata-rata lama genangan	menit	n/a	85	85	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan pengairan	Rata-rata lama genangan	menit	85	85
Meningkatkan keterhubungan antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Jumlah Pulau yang berpenghuni yang tercakupi jaringan transportasi	%	8	11	11	Terhubungnya Aktivitas antar pulau	Jumlah Pulau yang berpenghuni yang tercakupi jaringan transportasi	%	11	11

Misi 3: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis					Meningkatnya profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	46

Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Target 2021 Pasca Pandemi Covid	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Target 2021 Pasca Pandemi Covid
--------	------------------	--------	----------------------	---------------------	---------------------------------	---------	-------------------	--------	-------------	---------------------------------

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Target 2021 Pasca Pandemi Covid	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Target 2021 Pasca Pandemi Covid
Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdayasaing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	11,98	13,20	13,20	Meningkatnya keluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu	APK PAUD 3-6 Tahun	%	61,10	61,10
	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,28	9	9	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar (SD/MI/SLB/Paket A dan SMP/MTS/Paket B)	APM SD/MI/SLB/Paket A	%	97,5	97,5
							APM SMP/MTs/Paket B	%	80	80
							Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	13,20	13,20
							Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9	9
						Meningkatnya kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang berdampak pada kualitas hasil belajar siswa	Persentase guru yang bersertifikat profesi	%	100	100
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas.	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,98	70	70	Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu, anak dan lansia serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Presentase balita gizi buruk	%	0,33	0,33
						Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH		12	12
						Angka Kematian ibu	Per 100.000 KH		< 231	< 231
						Jumlah Kecamatan dengan API < 1 per 1.000 penduduk	Jumlah Kecamatan		10	10

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Target 2021 Pasca Pandemi Covid	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Target 2021 Pasca Pandemi Covid
							Insiden Rate DBD per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	33	33
							Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (<i>sukses rate</i>)	%	85	85
							Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat	Jumlah Desa/Kel	51	51
						Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan kesehatan dan Tersedianya Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	Persentase penduduk yang menjadi peserta JKN	%	100	100
							Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Jumlah Puskesmas	15	15
							Status Akreditasi Rumah Sakit oleh komisi Akreditasi rumah sakit (KARS)	Status	TK.Madya	TK.Madya
						Terkendalnya pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,8	2,8
Meningkatkan calon tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing serta terpenuhi hak dan perlindungannya.	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,74	5,39	7	Meningkatnya kualitas, daya saing dan penempatan tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,39	5,39

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Target 2021 Pasca Pandemi Covid	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Target 2021 Pasca Pandemi Covid
						Meningkatnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan	%	100	100

Misi 5 : Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu	Peraturan yang mendukung kelestarian nilai dan seni budaya melayu	Jumlah Peraturan	n/a	12	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah	Peraturan yang mendukung kelestarian nilai dan seni budaya melayu	Jumlah Peraturan	12
Peningkatan kualitas kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat Bintan	Jumlah Kasus Perselisihan antar umat beragama	konflik	0	0	Terwujudnya toleransi antar umat beragama	Jumlah Kasus Perselisihan antar umat beragama	konflik	0
					Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama	Persentase siswa SMP beragama Islam memiliki sertifikat	%	83

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
					sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	khatam Al Quran		

Misi 6 : Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Target 2021 Pasca Covid	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Target 2021 Pasca Covid
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	%	92,41	92,41	92,41	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	%	92,41	92,41
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,92	≥70	≥70	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	≥70	≥70
	Persentase penduduk miskin	%	6,07	<6,5	> 6,5		Persentase penduduk miskin	%	<6,5	>6,5
							Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	82	82
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat	poin	n/a	>50	<50	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Masyarakat	poin	>50	>50
						Meningkatnya pengelolaan pembangunan oleh	Indeks Desa Membangun	poin	>50	>50

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Target 2021 Pasca Covid	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Target 2021 Pasca Covid
						pemerintah desa				

Misi 7 : Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	10	80	Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	80
						Jumlah prestasi olah raga yang diraih tingkat provinsi dan nasional	Prestasi	53

Misi 8 : Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, perkebunan dan peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB	%	1,2%	1,3%	Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan	Persentase pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB	%	1,3%

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh desa dan kelurahan	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	100	100	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat di seluruh wilayah	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	100
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Persentase RTH	%	n/a	100	Meningkatnya kebersihan lingkungan serta upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Hasil pengukuran indeks kualitas air	poin	70
						Hasil pengukuran indeks kualitas Udara	poin	1
					Terpenuhi standar luas ruang terbuka hijau yang dikelola	Persentase RTH	%	100

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries), menghadapi tantangan besar akibat pandemi Covid-19 di awal tahun 2020.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi. Juga direncanakan untuk

melakukan peningkatan sistem kesehatan nasional, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2019 menunjukkan bahwa PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air dan PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya masih memberikan ruang untuk dilakukan peningkatan kinerjanya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut dan kondisi Indonesia pada tahun 2020 maka tema RKP 2021, “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam

Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD. Adapun dukungan program dan

anggaran yang akan dilaksanakan selama tahun 2021 oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan
Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD (Rp.)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.728.065.281,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Dinas Tenaga Kerja	15.864.000,00
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
	Dinas Tenaga Kerja	140.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.864.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	500.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.000.000,00
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	25.554.312,00
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	150.799.920,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	80.459.951,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	DINAS PERIKANAN	4.049.100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
	DINAS PERIKANAN	10.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
	DINAS PERIKANAN	10.000.000,00
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
	DINAS PERIKANAN	10.000.000,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran Belanja Dalam
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	195.000.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	85.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	KECAMATAN GUNUNG KIJANG	7.200.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	KECAMATAN GUNUNG KIJANG	13.711.503,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	KECAMATAN GUNUNG KIJANG	466.562.495,00
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	846.344.847,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	50.000.000,00
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	30.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	40.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	60.429.330,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	KECAMATAN BINTAN UTARA	4.914.000,00
	KECAMATAN BINTAN PESISIR	14.950.000,00
	KECAMATAN MANTANG	10.000.000,00
	KECAMATAN TOAPAYA	5.000.000,00
	KECAMATAN TELUK SEBONG	500.000,00
	KECAMATAN TELUK BINTAN	300.000,00
	KECAMATAN BINTAN TIMUR	1.168.898,00
	KECAMATAN SERI KUALA LOBAM	8.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	KECAMATAN BINTAN UTARA	25.000.000,00
	KECAMATAN BINTAN PESISIR	28.988.611,00
	KECAMATAN TOAPAYA	25.000.000,00
	KECAMATAN TELUK SEBONG	7.000.000,00
	KECAMATAN TELUK BINTAN	30.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	KECAMATAN BINTAN UTARA	25.500.000,00
	KECAMATAN MANTANG	75.000.000,00
	KECAMATAN TELUK SEBONG	70.000.000,00
	KECAMATAN TELUK BINTAN	6.600.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran Belanja Dalam
	KECAMATAN BINTAN TIMUR	222.000.000,00
	KECAMATAN SERI KUALA LOBAM	50.000.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	KECAMATAN BINTAN PESISIR	28.894.008,00
	KECAMATAN TELUK SEBONG	7.100.000,00
	KECAMATAN TELUK BINTAN	15.000.000,00
	KECAMATAN SERI KUALA LOBAM	5.000.000,00
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.109.631.055,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Dinas Kesehatan	35.000.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Dinas Kesehatan	18.200.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Dinas Kesehatan	30.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Dinas Sosial	44.250.000,00
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	Dinas Sosial	3.682.000,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
	Dinas Sosial	25.000.000,00
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	Dinas Sosial	111.144.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	45.000.000,00
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	90.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100.000.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50.000.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.382.153.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	17.456.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran Belanja Dalam
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	890.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	21.452.664,00
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	39.999.972,00
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	39.967.669,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	117.200.750,00
	KECAMATAN GUNUNG KIJANG	49.125.000,00
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	776.947.270,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA	9.450.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA	80.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA	180.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.000.000,00
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	213.676.530,00
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	110.061.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	99.126.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.633.740,00
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2.408.480.800,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Dinas Pendidikan	40.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	Dinas Pendidikan	75.000.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
	Dinas Pendidikan	100.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran Belanja Dalam
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	900.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	650.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.864.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	60.400.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	DINAS PERHUBUNGAN	7.380.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
	DINAS PERHUBUNGAN	22.136.800,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	92.500.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.200.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	75.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	75.000.000,00
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	441.800.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	31.800.000,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.000.000,00
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	300.000.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000,00
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	75.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran Belanja Dalam
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2.223.851.033,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Satuan Polisi Pamong Praja	10.227.283,00
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
	SEKRETARIAT DAERAH	150.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.500.000,00
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.419.009.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	SEKRETARIAT DAERAH	42.504.000,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
	SEKRETARIAT DAERAH	70.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	SEKRETARIAT DPRD	120.000.000,00
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	43.666.000,00
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	75.570.600,00
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	110.439.150,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.500.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24.000.000,00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	99.435.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Inspektorat Daerah	6.000.000,00

Tabel 3.3
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD (Rp.)
1	Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat	213,776,772,980.00
2	Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas	220,653,280,900.00
3	Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman	20,344,039,050.00
4	Pemantapan tata kelola pemerintahan	760.425.662.239.00
5	Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu	2.554.611.600,00
		1.217.754.366.769,00

Tabel 3.4
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bintan
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2021

Kode	Uraian	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD (Rp.)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	630.639.078.691,00
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	290.370.780.000,00
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	84.999.983.268,00
1 1 5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	500.000.000,00
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	179.157.245.247,00
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	60.811.951.501,00
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.385.663.320,00
1 2 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	646.756.000,00
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.899.621.304,00
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	72.988.137.700,00
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	700.000.000,00
1 3 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.807.120.000,00
1 3 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	471.000.000,00
1 3 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	8.691.000.000,00
1 3 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.455.000.000,00
1 3 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	29.581.585.000,00

Kode			Uraian	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD (Rp.)
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.200.000.000,00
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.550.000.000,00
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	49.185.408.400,00
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	60.400.000,00
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	738.600.000,00
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	28.071.158.800,00
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	28.464.385.644,00
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.484.526.468,00
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	490.400.000,00
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	265.249.000,00
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.473.121.700,00
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	846.531.000,00
1	6	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	62.140.000,00
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.204.655.000,00
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.277.116.000,00
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	111.144.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	139.111.246.431,00
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.543.626.800,00
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	140.000.000,00
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	377.672.000,00
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	183.799.180,00
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	489.613.000,00
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.454.700.552,00
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	262.670.000,00
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	63.930.000,00
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	201.000.000,00
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	508.081.000,00
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	11.341.146.300,00
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	700.000.000,00
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	545.000.000,00
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	15.000.000,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	150.000.000,00
2	10	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	150.000.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	24.864.645.700,00
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	660.000.000,00
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	55.000.000,00
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.786.975.000,00

Kode			Uraian	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD (Rp.)
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	10.000.000,00
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	20.000.000,00
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	25.000.000,00
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10.000.000,00
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000,00
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	12.717.453.000,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.408.134.200,00
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.459.009.000,00
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	385.591.000,00
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	419.333.000,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.184.540.979,00
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	30.000.000,00
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	603.395.500,00
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	998.400.000,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.792.676.000,00
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	85.660.000,00
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.661.753.000,00
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	45.263.000,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	19.915.488.100,00
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.857.717.600,00
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	8.582.280.000,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.186.823.200,00
2	16	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.870.720.000,00
2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.578.750.000,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.054.978.100,00
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	310.000.000,00
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	274.594.000,00
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	200.000.000,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.114.648.100,00
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	144.731.998,00
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	358.839.544,00
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	375.680.785,00
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	17.399.676,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.505.484.800,00
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.675.000.000,00

Kode			Uraian	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD (Rp.)
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.590.000.000,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	75.000.000,00
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	75.000.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	75.000.000,00
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	75.000.000,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	9.156.421.500,00
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.530.000.000,00
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	80.000.000,00
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	799.102.000,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.208.022.479,00
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	479.999.957,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	79.909.621,00
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	79.909.621,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	37.938.967.900,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	22.887.615.900,00
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.176.050.000,00
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.927.950.000,00
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	30.000.000,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4.050.778.000,00
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	250.000.000,00
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.682.000.000,00
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.118.778.000,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	4.650.087.000,00
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.210.000.000,00
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.950.087.000,00
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	225.000.000,00
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	15.000.000,00
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	250.000.000,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	910.000.000,00
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	500.000.000,00
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	110.000.000,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.440.487.000,00
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.365.487.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	93.153.205.242,00
4	1		SEKRETARIAT DAERAH	59.128.809.872,00
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	22.210.363.993,00
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.365.815.030,00
4	2		SEKRETARIAT DPRD	34.024.395.370,00
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.432.538.000,00

Kode		Uraian	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD (Rp.)
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	227.506.884.604,00
5	1	PERENCANAAN	14.921.633.475,00
5	1	2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.040.431.010,00
5	1	3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.394.322.500,00
5	2	KEUANGAN	188.500.089.871,00
5	2	2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	122.718.905.430,00
5	2	3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.786.247.600,00
5	2	4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.960.000.000,00
5	3	KEPEGAWAIAN	22.367.334.258,00
5	3	2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.240.172.000,00
5	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.417.827.000,00
5	5	2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.417.827.000,00
5	6	PENGELOLAAN PERBATASAN	300.000.000,00
5	6	2 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	300.000.000,00
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.045.393.160,00
6	1	INSPEKTORAT DAERAH	11.045.393.160,00
6	1	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.430.000.000,00
6	1	3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	515.000.000,00
7		UNSUR KEWILAYAHAN	71.791.807.052,00
7	1	KECAMATAN	71.791.807.052,00
7	1	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	930.126.760,00
7	1	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.452.630.826,00
7	1	6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	343.216.481,00
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.567.783.689,00
8	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.567.783.689,00
8	1	2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	213.676.530,00
8	1	3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.257.442.613,00
8	1	4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	99.126.000,00
8	1	5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	65.623.600,00
8	1	6 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	371.708.942,00

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BEDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup serta setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Sebagaimana disebutkan pula pada ketentuan pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja sebagaimana dimaksud diatas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait

Belanja Daerah disusun berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Daerah atau Rencana Belanja Daerah pada tahun anggaran 2021 didasarkan pada kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah sebesar Rp.1.175.977.811.569,- yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja transfer. Untuk lebih jelasnya plafon anggaran sementara masing-masing urusan pemerintahan dan per OPD dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2021

KODE			Urusan Pemerintahan Daerah dan Nama Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	630.297.478.691,00
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	289.870.780.000,00
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	289.870.780.000,00
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	179.337.245.247,00
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	Dinas Kesehatan	179.337.245.247,00
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	72.988.137.700,00
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72.988.137.700,00

KODE			Urusan Pemerintahan Daerah dan Nama Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	49.163.808.400,00
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	49.163.808.400,00
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	28.464.385.644,00
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja	19.627.963.812,00
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.836.421.832,00
1	5	8.01.1.05.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.473.121.700,00
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	Dinas Sosial	10.473.121.700,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	138.233.448.652,00
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.543.626.800,00
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	Dinas Tenaga Kerja	5.543.626.800,00
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.454.700.552,00
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.454.700.552,00
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	11.341.146.300,00
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.341.146.300,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	150.000.000,00
2	10	4.01.2.10.5.06.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	150.000.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	24.843.045.700,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	24.843.045.700,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.408.134.200,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.408.134.200,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	6.553.943.200,00

KODE			Urusan Pemerintahan Daerah dan Nama Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara
			DESA	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.553.943.200,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.792.676.000,00
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.792.676.000,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	19.915.488.100,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	19.915.488.100,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.165.223.200,00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.165.223.200,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.054.978.100,00
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8.054.978.100,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.910.648.100,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.910.648.100,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.505.484.800,00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.505.484.800,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	75.000.000,00
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	75.000.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	75.000.000,00
2	21	2.16.2.20.2.21.01.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	75.000.000,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	9.156.421.500,00
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	9.156.421.500,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.208.022.479,00
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	5.208.022.479,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	79.909.621,00
2	24	2.23.2.24.0.00.01.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	79.909.621,00

KODE			Urusan Pemerintahan Daerah dan Nama Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	38.003.767.900,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	22.952.415.900,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	DINAS PERIKANAN	22.952.415.900,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4.050.778.000,00
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4.050.778.000,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	4.650.087.000,00
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.650.087.000,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	910.000.000,00
3	30	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	910.000.000,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.440.487.000,00
3	31	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.440.487.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	93.551.605.242,00
4	1		SEKRETARIAT DAERAH	59.728.809.872,00
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	59.728.809.872,00
4	2		SEKRETARIAT DPRD	33.822.795.370,00
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	SEKRETARIAT DPRD	33.822.795.370,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	228.219.882.383,00
5	1		PERENCANAAN	14.821.633.475,00
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.821.633.475,00
5	2		KEUANGAN	189.313.087.650,00
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	165.988.147.800,00
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	23.324.939.850,00
5	3		KEPEGAWAIAN	22.367.334.258,00
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.367.334.258,00
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.417.827.000,00
5	5	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.417.827.000,00
5	6		PENGELOLAAN PERBATASAN	300.000.000,00

KODE			Urusan Pemerintahan Daerah dan Nama Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara
5	6	4.01.2.10.5.06.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	300.000.000,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.045.393.160,00
6	1		INSPEKTORAT DAERAH	11.045.393.160,00
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	Inspektorat Daerah	11.045.393.160,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	71.835.007.052,00
7	1		KECAMATAN	71.835.007.052,00
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN BINTAN UTARA	13.076.091.000,00
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN BINTAN PESISIR	2.994.095.352,00
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN TAMBELAN	5.341.434.400,00
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN MANTANG	3.030.171.500,00
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN TOAPAYA	5.729.632.600,00
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN TELUK SEBONG	5.699.320.100,00
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN TELUK BINTAN	5.634.880.100,00
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN GUNUNG KIJANG	7.215.588.300,00
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN BINTAN TIMUR	15.096.358.100,00
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN SERI KUALA LOBAM	8.017.435.600,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.567.783.689,00
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.567.783.689,00
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.567.783.689,00
TOTAL				1.217.754.366.769,00

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Pengalokasian anggaran, dengan mempertimbangkan potensi kemampuan keuangan daerah, untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021, secara Urusan, program, dan kegiatan adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Plafon Anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan
Tahun Anggaran 2021

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	630.297.478.691
1	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	289.870.780.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000				Dinas Pendidikan	289.870.780.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	204.870.796.732
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	177.775.187.801
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	177.607.460.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.728.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	149.999.801
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.728.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.728.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	890.198.210
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.985.873
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.909.020
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.987.162
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	277.990.420
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.999.735
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	297.326.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.078.248
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	12.695.248
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.383.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.573.933.354
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.999.370
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.120.933.984
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.671.119
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.953.426

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.944.900
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.926.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.846.793
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	84.999.983.268
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	50.914.536.705
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	4.323.463.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.012.024.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.038.800.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.212.300.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	9.620.452.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.219.540.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.080.480.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	671.254.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	647.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	75.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	3.100.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.639.080.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	4.965.144.087
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	29.999.618
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.800.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.480.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	26.857.146.563
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	815.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.744.580.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	319.130.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	45.590.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	638.260.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.513.182.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	433.290.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	786.031.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	2.900.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.981.480.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	2.318.403.600
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	129.999.963
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8.032.200.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.035.200.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	400.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.075.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	50.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	125.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	100.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	200.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	70.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	125.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.890.200.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.193.100.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.04	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	400.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.04	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	512.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	445.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	100.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	636.100.000
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	179.337.245.247
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00				Dinas Kesehatan	179.337.245.247
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	111.413.253.122
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.864.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	128.864.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72.615.533.122
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72.580.533.122
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.728.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.728.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	686.900.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.980.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	263.520.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.400.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.829.178.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	375.800.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.452.378.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.500.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.500.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	19.590.550.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	19.590.550.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	60.991.951.501
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	26.969.464.790
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.01	2	Pembangunan Puskesmas	6.136.418.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	393.250.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.01	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.690.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.01	6	Pengembangan Puskesmas	308.045.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	378.505.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	198.200.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.428.303.790
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.137.935.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.499.423.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.450.425.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	348.960.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.542.886.711
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	538.705.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	862.240.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	143.205.800
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	261.053.200
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	513.337.393
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	463.634.100
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	357.542.600
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	261.811.100
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	152.566.100
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	226.882.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
						Tuberkulosis	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	136.910.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	537.878.400
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	307.343.500
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	584.960.500
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	681.873.293
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	205.104.975
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	730.203.304
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	647.549.500
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.034.375.200
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	55.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.687.107.915
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15.178.205.922
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	140.885.125
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.113.632.288
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.582.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	124.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.124.040.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	620.731.496
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	270.108.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	389.600.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	239.600.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	150.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	50.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	02.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	40.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.385.663.320
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	3	02.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.325.663.320
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	3	02.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.295.663.320
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	3	02.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	30.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	3	02.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	3	02.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	646.756.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	4	02.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	271.640.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	4	02.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	271.640.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	4	02.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	20.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	4	02.02	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	20.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	4	02.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	313.694.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	4	02.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	313.694.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	4	02.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	41.422.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	4	02.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	41.422.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.899.621.304
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	5	02.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	727.223.500
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	5	02.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	727.223.500
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	5	02.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.172.397.804
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	5	02.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.172.397.804
1	3					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	72.988.137.700
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72.988.137.700
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.532.432.700
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.863.432.700
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.786.982.700
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.450.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.790.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	300.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	320.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	770.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	949.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.100.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	693.900.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	700.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	700.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.807.120.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	3	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.807.120.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	3	02.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	593.446.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	3	02.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	300.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	3	02.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.100.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	3	02.01	8	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.773.674.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	3	02.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	2.040.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	471.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	5	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	471.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	5	02.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	471.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	8.691.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	6	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.691.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	6	02.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	250.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	6	02.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	3.870.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	6	02.01	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	900.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	6	02.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.000.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	6	02.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	2.671.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.455.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	8	02.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	9.455.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	8	02.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	9.455.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	29.581.585.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	02.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	29.581.585.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	02.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	300.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	02.01	5	Pembangunan Jalan	9.198.889.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	02.01	8	Rekonstruksi Jalan	9.466.698.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	02.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	6.815.998.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	02.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.750.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	02.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	500.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	02.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	550.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.200.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	02.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	950.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	02.02	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	650.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	02.02	2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	300.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	02.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	250.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	02.04	3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	250.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.550.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	02.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	950.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	950.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	02.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	02.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	250.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	02.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	02.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	350.000.000
1	4					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	49.163.808.400
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	49.163.808.400
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.716.915.300
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.942.400
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.942.400
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.695.733.100

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.688.869.100
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.864.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.864.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.864.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	882.375.300
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	522.589.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.386.300
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.400.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	358.000.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	258.000.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.860.024.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.183.000.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	671.524.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	523.976.500
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	251.263.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.438.500
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	188.275.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	60.400.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	2	02.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	60.400.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	2	02.06	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	60.400.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	738.600.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	3	02.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	438.600.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	3	02.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	438.600.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	3	02.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	300.000.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	3	02.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	300.000.000
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	5.576.734.300
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	4	02.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	5.576.734.300
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	4	02.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)	5.576.734.300

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
						Ha	
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	28.071.158.800
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	5	02.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	28.071.158.800
1	4	1.04.0.00.0.00.01.0000	5	02.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	28.071.158.800
1	5					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	28.464.385.644
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00				Satuan Polisi Pamong Praja	19.627.963.812
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.143.437.344
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.195.015
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.997.949
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.197.066
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.064.007.495
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.053.780.212
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.227.283
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.587.973
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.587.973
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	443.045.720
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.005.930
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.190.441
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.385.347
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	230.602.998
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.049.172
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.811.832
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	206.870.241
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	20.058.781
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.811.460
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.218.930.000
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.050.000
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.153.880.000
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.800.900
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.800.900

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.484.526.468
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	2	02.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.365.106.978
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	2	02.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	71.428.070
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	2	02.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	62.240.240
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	2	02.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.219.663
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	2	02.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	160.485.242
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	2	02.01	7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.040.733.763
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	2	02.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	119.419.490
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	2	02.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	84.430.654
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	2	02.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	34.988.836
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.836.421.832
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.080.772.832
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.762.477.832
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.725.021.832
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.456.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	142.450.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	142.450.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.874.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.500.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153.374.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.200.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	31.800.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.400.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	638.731.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.681.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	547.550.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.040.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.040.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	490.400.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	3	02.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	167.400.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	3	02.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	3	02.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	3	02.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	42.400.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	3	02.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	30.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	3	02.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	235.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	3	02.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	3	02.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	160.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	3	02.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	3	02.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	88.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	3	02.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	3	02.04	3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	38.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	265.249.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	4	02.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	265.249.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000	4	02.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	265.249.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0
1	6					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.473.121.700
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00				Dinas Sosial	10.473.121.700
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.846.535.700
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.250.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.250.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.600.436.700

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.566.708.700
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.728.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.250.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.250.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.299.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.500.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.259.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.790.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.750.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	100.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	486.300.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	222.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	260.400.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	8.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	846.531.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	2	02.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	846.531.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	2	02.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10.562.975
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	2	02.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	42.563.025
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	2	02.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	721.837.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	2	02.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	71.568.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	62.140.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	3	02.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	62.140.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	3	02.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	62.140.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.204.655.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	02.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.009.273.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	02.01	1	Penyediaan Permakanaan	299.525.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	02.01	2	Penyediaan Sandang	17.500.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	02.01	3	Penyediaan Alat Bantu	23.500.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	02.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12.460.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	02.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	198.300.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	02.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	145.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	02.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	33.788.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	02.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	205.200.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	02.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	15.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	02.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	59.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	02.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	195.382.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	02.02	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.682.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	02.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	126.700.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	02.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	65.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.277.116.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	5	02.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	25.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	5	02.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	25.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	5	02.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.252.116.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	5	02.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	191.768.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	5	02.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.100.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	5	02.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	292.738.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	5	02.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	667.610.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	111.144.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	6	02.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	111.144.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	6	02.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	111.144.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	125.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	7	02.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	125.000.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	7	02.01	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	125.000.000
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	138.233.448.652
2	7					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.543.626.800
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00				Dinas Tenaga Kerja	5.543.626.800
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.352.542.620

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
						KABUPATEN/KOTA	
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.015.980
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.015.980
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.148.190.800
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.132.326.800
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.864.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.428.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.828.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58.600.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	505.487.800
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.120.900
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.947.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.500.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.519.900
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.400.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.000.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	19.500.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.500.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.047.600
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234.047.600
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.372.440
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.000.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	5.000.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.372.440
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	140.000.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	2	02.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	140.000.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	2	02.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	140.000.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	377.672.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	3	02.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	377.672.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	3	02.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	377.672.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	183.799.180
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	4	02.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	122.951.190

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	4	02.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	122.951.190
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	4	02.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	60.847.990
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	4	02.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	60.847.990
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	489.613.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	5	02.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	262.952.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	5	02.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	49.267.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	5	02.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	213.685.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	5	02.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	226.661.000
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	5	02.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	83.754.600
2	7	2.07.0.00.0.00.01.00	5	02.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	142.906.400
2	8					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.454.700.552
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.454.700.552
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.019.019.552
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.241.699.552
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.207.509.552
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.190.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.376.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.376.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.576.280
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.242.500
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.778.580
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.010.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.439.200
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.106.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.840.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.200.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	272.240.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.527.720

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.527.720
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	262.670.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	2	02.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	90.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	2	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	90.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	2	02.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	72.670.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	2	02.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	72.670.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	2	02.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	2	02.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	63.930.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	3	02.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	63.930.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	3	02.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	45.230.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	3	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.700.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	400.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	4	02.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	4	02.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	4	02.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	4	02.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	4	02.02	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	201.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	6	02.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	6	02.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	6	02.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	151.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	6	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	6	02.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	508.081.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	7	02.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	52.180.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	7	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	52.180.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	7	02.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	7	02.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	175.000.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	7	02.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	280.901.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000	7	02.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	280.901.000
2	9					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	11.341.146.300
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.341.146.300
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.081.146.300
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.945.520.300
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.931.656.300
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.864.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.864.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.864.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.938.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.480.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.500.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.500.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.958.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.500.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	809.324.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.200.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	656.624.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.500.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	700.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	2	02.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	2	02.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	700.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	545.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	3	02.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	30.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	3	02.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	15.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	3	02.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	15.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	3	02.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	15.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	3	02.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	15.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	3	02.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	500.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	3	02.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	500.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	15.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	5	02.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	5	02.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000
2	10					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	150.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000				SEKRETARIAT DAERAH	150.000.000
2	10	4.01.2.10.5.06.01.0000	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	150.000.000
2	10	4.01.2.10.5.06.01.0000	4	02.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000
2	10	4.01.2.10.5.06.01.0000	4	02.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000
2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	24.843.045.700
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	24.843.045.700
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.548.617.700
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.880.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.880.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.497.546.700
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.487.546.700
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.247.611.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	987.611.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	15.500.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.500.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.920.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.920.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.660.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.660.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	660.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2	02.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	10.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	10.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2	02.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	650.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	300.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	350.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	55.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	3	02.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	45.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	3	02.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	45.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	3	02.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	10.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	3	02.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	10.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.786.975.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4	02.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.786.975.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4	02.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	10.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4	02.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.776.975.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	10.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5	02.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	10.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5	02.01	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	10.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	20.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	6	02.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	6	02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	10.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	6	02.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	25.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	8	02.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	8	02.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	25.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	9	02.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	9	02.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10	02.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10	02.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	10.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	12.717.453.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	02.01		Pengelolaan Sampah	12.717.453.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	02.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	12.642.453.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	02.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	75.000.000
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.408.134.200

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.408.134.200
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.144.201.200
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.000.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.177.799.200
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.177.799.200
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.806.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.814.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.392.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.100.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.200.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	15.200.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	682.896.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.496.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.000.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	518.400.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.500.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.500.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.459.009.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	2	02.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	40.000.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	2	02.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	40.000.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	2	02.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1.419.009.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	2	02.03	3	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1.419.009.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	385.591.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	3	02.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	75.750.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	3	02.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	75.750.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	3	02.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	309.841.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	3	02.02	6	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	309.841.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	419.333.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	4	02.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	419.333.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	4	02.03	3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	419.333.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.553.943.200
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.553.943.200
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.922.147.700
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.805.171.200
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.797.443.200
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.728.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	549.401.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.001.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.800.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.600.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.575.500
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	238.375.500
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	30.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	3	02.01		Fasilitas Kerja sama antar Desa	30.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	3	02.01	2	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	30.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	603.395.500
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	02.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	603.395.500
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	02.01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	40.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	02.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	215.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	02.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	63.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	02.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	95.395.500

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	02.01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	70.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	02.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	40.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	02.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	30.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	02.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	50.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	998.400.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	5	02.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	998.400.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	5	02.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	63.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	5	02.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	40.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	5	02.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	85.400.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	5	02.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	500.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	5	02.01	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	100.000.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	5	02.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	210.000.000
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.792.676.000
2	8	2.08.2.14.0.00.01.0000				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.792.676.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	85.660.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2	02.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	25.550.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2	02.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	25.550.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2	02.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60.110.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2	02.02	3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	60.110.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.661.753.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	3	02.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	823.679.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	3	02.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	161.683.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	3	02.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	398.396.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	3	02.01	8	Pengendalian Program KKBPK	263.600.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	3	02.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.626.953.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	3	02.02	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	244.800.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	3	02.02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1.382.153.000

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	3	02.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	710.561.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	3	02.03	1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	578.729.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	3	02.03	3 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100.000.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	3	02.03	9 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	31.832.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	3	02.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	500.560.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	3	02.04	3 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	500.560.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	45.263.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	4	02.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	45.263.000
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	4	02.01	4 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	45.263.000
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	19.915.488.100
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000			DINAS PERHUBUNGAN	19.915.488.100
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.475.490.500
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.145.465.100
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.113.873.100
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.592.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.03	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.500.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61.500.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	675.985.400
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.380.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.146.400
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.368.080
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	198.073.460
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	78.097.620
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	297.919.840
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.800.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.07	5 Pengadaan Mebel	20.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.800.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.076.540.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.300.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	961.240.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.200.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.460.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.300.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.440.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.857.717.600
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2	02.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.175.031.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.961.339.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	213.692.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2	02.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	20.500.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	20.500.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2	02.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	82.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2	02.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	82.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2	02.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	327.906.600
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2	02.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	59.640.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2	02.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	103.266.600
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2	02.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	75.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2	02.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	90.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2	02.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	652.280.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2	02.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	599.280.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2	02.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	53.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2	02.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2	02.08	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	50.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2	02.08	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	50.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2	02.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2	02.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	8.582.280.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	3	02.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.080.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	3	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	36.080.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	3	02.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	8.546.200.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	3	02.12	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	8.260.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	3	02.12	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	286.200.000
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.165.223.200
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.165.223.200
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.715.753.200
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.188.433.200
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.157.623.200
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.810.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.200.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.200.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	382.600.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.600.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.520.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	10.020.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.500.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	778.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	648.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.870.720.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	2	02.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.870.720.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	2	02.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	50.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	2	02.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	25.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	2	02.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	273.720.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	2	02.01	6	Pelayanan Informasi Publik	50.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	2	02.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	50.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	2	02.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.422.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.578.750.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	3	02.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	3	02.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	3	02.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.478.750.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	3	02.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	480.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	3	02.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	948.750.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	3	02.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	50.000.000
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.054.978.100
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8.054.978.100
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.934.674.100
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.642.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.024.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.618.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.869.832.100
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.849.832.100
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	434.663.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.600.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.121.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.750.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.192.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	20.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.012.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.503.200
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.308.800
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.525.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.525.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	70.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	3	02.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	70.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	3	02.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	265.710.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	5	02.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	265.710.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	5	02.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	265.710.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	310.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	6	02.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	310.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	6	02.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	310.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	274.594.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	7	02.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	274.594.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	7	02.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	274.594.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	200.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	8	02.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	200.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	8	02.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	200.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.910.648.100
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.910.648.100
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.013.996.097
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.696.318.100
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.666.726.100
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.592.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.000.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.000.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	836.742.011
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.993.149
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.303.366
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.994.866
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	148.144.368
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	35.499.662
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	517.806.600
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.134.254.513
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.497.210
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.400.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	852.357.303
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.681.473
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.902.898
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.778.575
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	144.731.998
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	3	02.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	144.731.998
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	3	02.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	25.554.312
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	3	02.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	119.177.686
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	358.839.544
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	4	02.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	358.839.544
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	4	02.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	150.799.920
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	4	02.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	208.039.624

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	375.680.785
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	02.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	375.680.785
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	80.459.951
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	198.620.834
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	02.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	96.600.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	17.399.676
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	6	02.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.399.676
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	6	02.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	17.399.676
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.505.484.800
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00				DINAS KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	10.505.484.800
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.940.484.800
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.490.240.800
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.472.784.800
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.456.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	504.252.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.108.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.344.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.800.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	138.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.992.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.400.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	443.592.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.675.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	2	02.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.425.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	2	02.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	275.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	2	02.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	250.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	2	02.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	900.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	2	02.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	2	02.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	250.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.590.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	3	02.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	890.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	3	02.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	890.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	3	02.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	3	02.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	250.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	3	02.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	150.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	3	02.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.300.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	3	02.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.300.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.300.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	4	02.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.300.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	4	02.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1.300.000.000
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	75.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	75.000.000
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	75.000.000
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00	2	02.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00	2	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	75.000.000
2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	75.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	75.000.000
2	21	2.16.2.20.2.21.01.00	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	75.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
2	21	2.16.2.20.2.21.01.00	2	02.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000
2	21	2.16.2.20.2.21.01.00	2	02.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	75.000.000
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	9.156.421.500
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	9.156.421.500
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.747.319.500
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.546.948.500
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.521.584.500
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.364.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.364.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.364.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	627.810.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	196.900.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.910.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.587.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	19.675.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.912.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.063.610.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.450.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	270.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	784.160.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.530.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2	02.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.300.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2	02.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1.300.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2	02.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2	02.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	80.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2	02.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	2	02.03	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	150.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	80.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	5	02.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	80.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	5	02.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	80.000.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	799.102.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	6	02.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	799.102.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000	6	02.01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	799.102.000
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.208.022.479
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	5.208.022.479
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.728.022.522
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.381.460.100
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.373.732.100
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.728.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.248.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32.248.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	571.879.777
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.979.746
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.999.988
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.010.043
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	212.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.890.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.916.179
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.916.179
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.598.802
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.998.802
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.400.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	367.200.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.919.664
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.707.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.760.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.452.664
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	479.999.957
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	2	02.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	439.999.985
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	2	02.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	2	02.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.999.985
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	2	02.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	100.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	2	02.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.999.972
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	2	02.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	39.999.972
2	24					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	79.909.621
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	79.909.621
2	24	2.23.2.24.0.00.01.00	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	79.909.621
2	24	2.23.2.24.0.00.01.00	2	02.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	39.941.952
2	24	2.23.2.24.0.00.01.00	2	02.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	39.941.952
2	24	2.23.2.24.0.00.01.00	2	02.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	39.967.669
2	24	2.23.2.24.0.00.01.00	2	02.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	39.967.669
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	38.003.767.900
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	22.952.415.900
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00				DINAS PERIKANAN	22.952.415.900
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.818.415.900
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.006.160
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.006.160
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.495.001.162
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.484.412.900
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.588.262
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.400.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.400.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	302.484.626
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.718.181
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.817.569
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.949.114
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.762
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775.618.952
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.049.100
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	623.569.852
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.905.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.905.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.176.050.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	3	02.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	9.126.050.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	3	02.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	9.126.050.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	3	02.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	3	02.02	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	10.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	3	02.02	3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	40.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.927.950.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	4	02.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	560.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	4	02.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	550.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	4	02.02	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	10.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	4	02.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	5.367.950.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	4	02.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	4	02.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.347.950.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	30.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	6	02.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	20.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	6	02.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	6	02.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	10.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	6	02.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	10.000.000
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4.050.778.000
2	22	2.22.3.26.0.00.01.0000				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4.050.778.000
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	250.000.000
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	2	02.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	70.000.000
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	2	02.01	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	70.000.000
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	2	02.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	180.000.000
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	2	02.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	180.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.682.000.000
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3	02.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.682.000.000
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3	02.01	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	450.000.000
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	3	02.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2.232.000.000
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.118.778.000
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	5	02.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	945.778.000
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	5	02.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	895.778.000
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	5	02.01	7	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000.000
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	5	02.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	173.000.000
3	26	2.22.3.26.0.00.01.0000	5	02.02	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	173.000.000
3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	4.650.087.000
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.650.087.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.210.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	2	02.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.535.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	2	02.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	15.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	2	02.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.520.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	2	02.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	475.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	2	02.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	130.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	2	02.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	345.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	2	02.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	200.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	2	02.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	200.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.950.087.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3	02.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	50.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3	02.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	35.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3	02.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	15.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3	02.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	1.705.087.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3	02.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	832.087.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3	02.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	120.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3	02.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	753.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3	02.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	195.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3	02.03	1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak	195.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
						dan Rumpun/Galur Ternak	
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	225.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	4	02.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	4	02.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	85.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	4	02.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	4	02.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	125.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	4	02.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	15.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	4	02.04	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	15.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	15.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5	02.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	15.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5	02.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	15.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	250.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	7	02.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	250.000.000
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	7	02.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	250.000.000
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	910.000.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	910.000.000
3	30	2.17.3.31.3.30.01.0000	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	500.000.000
3	30	2.17.3.31.3.30.01.0000	4	02.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	500.000.000
3	30	2.17.3.31.3.30.01.0000	4	02.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	100.000.000
3	30	2.17.3.31.3.30.01.0000	4	02.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	400.000.000
3	30	2.17.3.31.3.30.01.0000	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	110.000.000
3	30	2.17.3.31.3.30.01.0000	6	02.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	110.000.000
3	30	2.17.3.31.3.30.01.0000	6	02.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	110.000.000
3	30	2.17.3.31.3.30.01.0000	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	300.000.000
3	30	2.17.3.31.3.30.01.0000	7	02.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	300.000.000
3	30	2.17.3.31.3.30.01.0000	7	02.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	300.000.000
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.440.487.000
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.440.487.000
3	31	2.17.3.31.3.30.01.0000	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.365.487.000
3	31	2.17.3.31.3.30.01.0000	2	02.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5.365.487.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
3	31	2.17.3.31.3.30.01.0000	2	02.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	120.000.000
3	31	2.17.3.31.3.30.01.0000	2	02.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5.195.487.000
3	31	2.17.3.31.3.30.01.0000	2	02.01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	50.000.000
3	31	2.17.3.31.3.30.01.0000	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	75.000.000
3	31	2.17.3.31.3.30.01.0000	4	02.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000
3	31	2.17.3.31.3.30.01.0000	4	02.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	75.000.000
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	93.551.605.242
4	1					SEKRETARIAT DAERAH	59.728.809.872
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000				SEKRETARIAT DAERAH	59.728.809.872
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.502.630.849
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	195.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.124.538.449
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.945.695.872
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.504.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	136.338.577
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.506.195.400
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.195.400
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.126.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	388.750.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	388.750.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.092.120.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.938.400.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.948.720.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1.379.500.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
						Pemerintahan Daerah	
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	279.500.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	980.628.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	766.628.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	214.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.352.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	875.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	672.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	805.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.13		Penataan Organisasi	658.899.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	228.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	90.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	140.899.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	670.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	255.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	200.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	1	02.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	215.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	22.860.363.993
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	2	02.01		Administrasi Tata Pemerintahan	4.049.408.443
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	2	02.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	80.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	2	02.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3.260.600.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	2	02.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	708.808.443
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	2	02.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	18.065.070.350
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	2	02.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	17.659.858.350
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	2	02.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	287.976.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	2	02.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	117.236.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	2	02.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	695.885.200
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	2	02.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	150.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	2	02.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	445.885.200
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	2	02.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	2	02.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	50.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	2	02.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	50.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.365.815.030

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	3	02.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	448.466.180
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	3	02.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	151.611.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	3	02.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	175.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	3	02.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	121.855.180
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	3	02.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	295.348.850
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	3	02.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	70.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	3	02.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	95.348.850
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	3	02.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	130.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	3	02.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	622.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	3	02.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	118.264.180
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	3	02.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	394.135.820
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000	3	02.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	109.600.000
4	2					SEKRETARIAT DPRD	33.822.795.370
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00				SEKRETARIAT DPRD	33.822.795.370
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.340.233.370
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.706.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.294.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.190.822.924
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.183.094.924
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.728.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	246.800.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64.800.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	182.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.054.747.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	478.387.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.360.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.054.500.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.400.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	363.600.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	362.957.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	103.543.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.060.072.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	229.200.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.818.872.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.430.030.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.250.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.062.500.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.400.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.880.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	629.250.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	604.250.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	25.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.223.011.446
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.105.121.446
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	117.890.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.16		Layanan Administrasi DPRD	330.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	02.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	330.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.482.562.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.400.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	249.750.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.062.120.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	88.130.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	680.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	140.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	140.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	3	Pembahasan APBD	140.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	140.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	120.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.020.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	700.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	700.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	700.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	700.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	700.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	700.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	700.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	120.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	1.270.360.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.04	2	Bimbingan Teknis DPRD	770.650.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	459.410.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	40.300.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.412.202.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	750.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	50.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.05	3	Pelaksanaan Reses	1.612.202.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	700.000.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	02.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	700.000.000
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	228.219.882.383
5	1					PERENCANAAN	14.821.633.475
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.821.633.475
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.486.879.965
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	133.666.000
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.000.000
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.666.000
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.708.357.600
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.704.493.600
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.864.000
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.864.000
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.864.000
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	117.200.750
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	117.200.750
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	855.587.592
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.058.775
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.176.068
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58.597.883
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	255.338.149
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.169.617
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.247.100
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.833.050
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.833.050
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.146.333.973
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.568.005

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	470.000.000
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	669.765.968
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.037.000
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.693.000
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.150.000
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	169.824.000
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.370.000
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.940.431.010
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.360.302.360
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	75.570.600
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	85.500.000
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	180.500.000
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	230.921.250
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	407.659.250
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	146.328.310
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.233.822.950
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	164.066.050
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	78.880.100
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	85.185.950
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	416.062.600
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	416.062.600
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.394.322.500
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	3	02.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	825.545.600
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	3	02.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	166.000.000
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	3	02.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	119.000.000
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	3	02.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	171.360.000
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	3	02.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	257.040.000
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	3	02.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	112.145.600
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	3	02.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.047.594.300

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	3	02.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	110.439.150
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	3	02.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	113.594.550
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	3	02.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	272.717.150
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	3	02.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	113.594.550
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	3	02.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	311.032.700
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	3	02.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	126.216.200
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	3	02.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	521.182.600
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	3	02.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	180.308.800
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	3	02.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	115.487.800
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	3	02.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	225.386.000
5	2					KEUANGAN	189.313.087.650
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000				Badan Keuangan dan Aset Daerah	165.988.147.800
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.482.994.770
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.721.141.300
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.696.141.300
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.864.194.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.800.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	392.400.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368.994.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.315.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.030.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	200.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.598.954.270
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.400.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.057.409.870
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.530.144.400
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	708.705.200
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	422.850.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191.005.200
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.850.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	122.718.905.430
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	535.167.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	28.662.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	20.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	225.060.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	261.445.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	177.651.600
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	97.651.600
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	80.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	813.300.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	45.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	108.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	250.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	130.300.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	45.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	60.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	175.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	120.625.341.830
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.04	2	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	60.429.330
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	118.264.912.500
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.300.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	567.445.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	447.445.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	2	02.05	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	120.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.786.247.600
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	3	02.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.786.247.600
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	3	02.01	1	Penyusunan Standar Harga	487.200.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	3	02.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	3	02.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	130.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	3	02.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	94.667.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	3	02.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	160.620.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	3	02.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	203.965.600
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	3	02.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	290.689.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	3	02.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	95.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	3	02.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	224.106.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000				BADAN PENDAPATAN DAERAH	23.324.939.850
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.364.939.850
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.389.295.850
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.368.839.850
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.456.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.500.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.500.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	83.500.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	609.684.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.497.600
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.686.400
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.500.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	308.500.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	20.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	288.500.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.667.460.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.900.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.260.560.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.960.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	4	02.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.960.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	4	02.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	100.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	4	02.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	200.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	4	02.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	60.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	4	02.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	330.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	4	02.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	150.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	4	02.01	11	Penagihan Pajak Daerah	920.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	4	02.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	4	02.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	150.000.000
5	3					KEPEGAWAIAN	22.367.334.258
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.367.334.258
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.127.162.258
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.410.334.258
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.400.334.258
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	484.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	147.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.823.684.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.400.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.600.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.793.684.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.144.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.144.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.240.172.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	660.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	220.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	80.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	110.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.02		Mutasi dan Promosi ASN	375.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	100.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	125.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	150.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.03		Pengembangan Kompetensi ASN	1.965.172.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	2	Pengelolaan Assessment Center	225.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1.640.172.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	50.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	50.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	240.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	80.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	55.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	25.000.000
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	02.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	80.000.000
5	5					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.417.827.000
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.417.827.000
5	5	5.01.5.05.0.00.01.0000	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.417.827.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
5	5	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	293.001.800
5	5	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	180.308.800
5	5	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	112.693.000
5	5	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	180.308.800
5	5	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	180.308.800
5	5	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	225.386.000
5	5	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	225.386.000
5	5	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	719.130.400
5	5	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	189.324.250
5	5	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	182.111.900
5	5	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	99.435.000
5	5	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	02.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	248.259.250
5	6					PENGELOLAAN PERBATASAN	300.000.000
4	1	4.01.2.10.5.06.01.0000				SEKRETARIAT DAERAH	300.000.000
5	6	4.01.2.10.5.06.01.0000	2			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	300.000.000
5	6	4.01.2.10.5.06.01.0000	2	02.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	100.000.000
5	6	4.01.2.10.5.06.01.0000	2	02.01	2	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	100.000.000
5	6	4.01.2.10.5.06.01.0000	2	02.03		Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	200.000.000
5	6	4.01.2.10.5.06.01.0000	2	02.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	200.000.000
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.045.393.160
6	1					INSPEKTORAT DAERAH	11.045.393.160
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00				Inspektorat Daerah	11.045.393.160
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.100.393.160
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.500.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.500.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.091.321.160
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.083.593.160
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.728.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	500.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	130.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	501.072.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.072.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	158.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	15.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.430.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	02.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	685.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	02.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	225.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	02.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	75.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	02.01	3	Reviu Laporan Kinerja	55.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	02.01	4	Reviu Laporan Keuangan	55.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	02.01	5	Pengawasan Desa	100.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	02.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	75.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	02.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	02.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	745.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	02.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	100.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	02.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	645.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	515.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	3	02.02		Pendampingan dan Asistensi	515.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	3	02.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	300.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	3	02.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	50.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	3	02.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	165.000.000
7						UNSUR KEWILAYAHAN	71.835.007.052
7	1					KECAMATAN	71.835.007.052
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000				KECAMATAN BINTAN UTARA	13.076.091.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.256.291.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	45.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
						Daerah	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.323.305.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.318.391.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.914.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.814.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.814.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.800.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.800.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	568.592.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.040.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.752.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.800.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	33.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.039.480.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.400.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.280.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	856.800.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.300.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.300.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	105.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	55.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	50.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.704.800.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.706.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	62.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.366.528.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.277.472.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	998.800.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	02.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	778.800.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	02.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	220.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000				KECAMATAN BINTAN PESISIR	2.994.095.352
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.779.473.147
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.778.000
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.828.000
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.950.000
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.001.823.352
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.994.095.352
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.728.000
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.361.758
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.930.070
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.841.443
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.185.409
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.993.836
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.411.000
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	940.847
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	940.847
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.342.190
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.760.000
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	359.582.190
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.227.000
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.800.000
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.430.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.997.000
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.588.319
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.988.611
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.988.611
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	24.599.708
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.599.708
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	101.510.758
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	101.510.758
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	101.510.758
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	59.523.128
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.523.128
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28.894.008
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	6	02.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30.629.120
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000				KECAMATAN TAMBELAN	5.341.434.400
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.905.854.400
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.942.734.400
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.942.734.400
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.520.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.207.200
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.712.800
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.548.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.052.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.600.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	20.600.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.600.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.400.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	528.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	119.292.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95.428.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95.428.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	23.864.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.864.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.286.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	125.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	125.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.161.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	847.343.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	313.657.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.288.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.288.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	6	02.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30.288.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000				KECAMATAN MANTANG	3.030.171.500
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.709.947.500
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.900.171.500
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.890.171.500
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.400.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17.400.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.668.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.501.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	189.567.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.600.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.540.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.740.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	369.600.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.168.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.168.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	209.336.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	201.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	201.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	8.336.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.336.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	75.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	3	02.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	35.888.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.888.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.738.000
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	6	02.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	18.150.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000				KECAMATAN TOAPAYA	5.729.632.600
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.114.425.600
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.833.732.600
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.825.732.600
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	300.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	300.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.645.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.645.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	317.200.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.200.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	755.548.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.820.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	651.028.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	55.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	25.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.524.107.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	183.107.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	183.107.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.161.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	870.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	180.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	3	02.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	180.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36.100.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.100.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.100.000
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	6	02.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	30.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
						dengan Pembangunan Desa	
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000				KECAMATAN TELUK SEBONG	5.699.320.100
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.301.148.100
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.033.146
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.033.146
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.127.220.100
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.124.720.100
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.500.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	500.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.305.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.305.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	318.829.854
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.400.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.400.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.400.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	146.575.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.054.854
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.540.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	33.040.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	630.520.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.120.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.400.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	517.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.200.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.200.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.722.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	27.722.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.722.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.324.350.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	93.350.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	93.350.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.161.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	953.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	208.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	70.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	3	02.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	39.100.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39.100.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.100.000
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	6	02.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	32.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000				KECAMATAN TELUK BINTAN	5.634.880.100
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.250.380.100
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.400.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.700.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.700.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.303.880.100
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.303.580.100
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	300.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	300.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.500.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.802.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.848.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.700.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.150.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.500.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	6.500.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.800.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.600.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.200.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	1.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65.300.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	35.300.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.300.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.284.200.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	110.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	110.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.174.200.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.600.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	931.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	236.600.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	35.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	6	02.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000				KECAMATAN GUNUNG KIJANG	7.215.588.300
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.911.709.048
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.181.443.900
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.174.243.900
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	7.200.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
						Keuangan SKPD	
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.500.000
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.125.000
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.125.000
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	366.484.942
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.999.670
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.999.891
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.164.285
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	113.993.803
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.293
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.328.000
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	297.733.001
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.697.883
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	175.035.118
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	840.717.636
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.126.718
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.900.000
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	689.690.918
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.704.569
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.904.719
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.970.050
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.829.800
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	58.503.276
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	31.953.276
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	2	02.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	18.241.773
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.711.503
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	26.550.000
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	26.550.000
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.183.058.623
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	466.562.495
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	466.562.495
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.221.496.128
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.041.520

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.062.915.251
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	153.539.357
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	495.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	3	02.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	495.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	62.317.353
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	62.317.353
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18.190.365
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	44.126.988
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000				KECAMATAN BINTAN TIMUR	15.096.358.100
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.697.903.490
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.918.898
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.750.000
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.168.898
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.921.436.085
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.868.858.100
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.577.985
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	601.857.749
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.119.098
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	87.443.218
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	265.952.463
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.492.970
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.850.000
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	749.384.493
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	282.506.328
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	466.878.165
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.134.969.661
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.438.442
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.920.000
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	173.451.219
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.721.160.000
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.336.604
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.430.604
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.931.000
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.975.000
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	49.385.165

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	19.385.905
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	2	02.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	9.849.050
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.536.855
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	29.999.260
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	29.999.260
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.319.069.445
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	200.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	200.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.644.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.062.116.000
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.581.884.000
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	475.069.445
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	3	02.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	475.069.445
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	6	02.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000				KECAMATAN SERI KUALA LOBAM	8.017.435.600
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.181.900.600
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.800.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.800.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.873.477.600
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.858.735.600
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.742.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.914.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.914.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.758.750
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.758.750
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	358.845.250
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.500.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.100.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.805.250
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.510.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.930.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.525.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	8.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.525.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	713.580.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.760.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.020.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	604.800.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	180.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	135.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	45.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.650.535.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.339.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.766.271.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	555.729.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	311.535.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	3	02.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	261.535.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	3	02.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.567.783.689
8	1					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.567.783.689
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.567.783.689

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.560.206.004
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.024.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.024.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.693.349.076
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.693.349.076
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.400.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.400.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.570.928
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.570.928
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.812.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.752.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.560.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.050.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.050.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	7.000.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	213.676.530
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	2	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	213.676.530
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	2	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	213.676.530
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.257.442.613
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	3	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.257.442.613
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	3	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	747.381.613

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	3	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400.000.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	3	02.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	110.061.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	99.126.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	4	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	99.126.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	4	02.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	99.126.000
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	65.623.600
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	5	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	65.623.600
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	5	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	65.623.600
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	371.708.942
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	6	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	371.708.942
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	6	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	77.633.740
8	1	8.01.1.05.0.00.01.0000	6	02.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	294.075.202
TOTAL							1.217.754.366.769

4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

1) Belanja Hibah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah sebagaimana dimaksud diatas dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

2) Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja bantuan digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun arlggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

3) Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud tidak mencukupi, menggunakan: a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta

pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

1. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak tersebut ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

4) Belanja Transfer

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah

kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.

a. Belanja bagi hasil

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari aspek teknis penganggaran, untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa harus diuraikan ke dalam daftar pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b. Belanja bantuan keuangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja bantuan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. Bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
- b. Bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
- c. Bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya;
- d. Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/ kota kepada desa.

Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus. Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan. Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk

miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan. Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Secara rinci gambaran terhadap plafon anggaran sementara untuk Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.3
**Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai,
 Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
 Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
 Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3
1	Belanja Pegawai	520.513.763.936
2	Belanja Barang dan Jasa	368.376.030.262
3	Belanja Hibah	47.107.171.843
4	Belanja Bantuan Sosial	7.657.000.000
5	Belanja Modal	153.535.488.228
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.634.319.932
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.070.964.660
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.970.573.500
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.859.630.136
6	Belanja Tidak Terduga	2.300.000.000
7	Belanja Bagi Hasil	23.169.293.000
8	Belanja Bantuan Keuangan	95.095.619.500
	TOTAL	1.217.754.366.769

Dalam hal penerimaan pembiayaan untuk tahun 2021 Kebijakan pemerintah daerah adalah memanfaatkan penerimaan SiLPA tahun anggaran 2020, SiLPA dimaksud diprediksi dari hasil efisiensi pelaksanaan belanja dan kelebihan target pendapatan, yang selanjutnya diharapkan dapat menutup defisit tahun anggaran berjalan. Pada anggaran Tahun 2021 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebesar Rp.43.314.621.418,-, sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.1.600.000.000,-.

Tabel 4.4
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	63.695.069.230	

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	63.695.069.230	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	63.695.069.230	
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.600.000.000	
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	1.600.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.600.000.000	
	Pembiayaan Netto	62.095.069.230	

BAB V
PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021 disusun yang selanjutnya untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan dan akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan PPAS, seperti adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Bintan, adanya penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS ini.

Bandar Seri Bentan, 2 Nopember 2020

